**SISTEM PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN AKAD RAHJN
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
MUTIARA HARAPAN JAMAAH KOLAKA”**

Fitri Rahayu¹, Muh. Iqbal², Abd. Haris Naustion³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : muh.iqbal@usimar.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang dalam penerapannya tidak menyimpang dari prinsip syariah. Salah satu Pembiayaan yang ada di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu Gadai Syariah dengan menggunakan akad *Rahjñ. Ar-Rahjñ* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari Muharjam, S.Pd,M.Pd selaku Ketua Koperasi, dan Asmaharani, S.Pd selaku Bendahara Koperasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembiayaan di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu Tabungan wajib/pokok dengan menggunakan akad *Mud}a>rabah Musya>rakah*, Tabungan suka rela dengan menggunakan akad *Wadia>h*, Kredit dengan menggunakan akad *Mur}a>bahah*, dan Gadai Syariah dengan menggunakan akad *Rahjñ*. Bentuk pembiayaan menggunakan akad *Rahjñ* di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahjñ*.

Kata Kunci: Sistem Pembiayaan Pada Akad *Rahjñ*, KSPPS Mutiara Harapan Jamaah.

A. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan bentuk payung hukum yang melandasi kegiatan operasional BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan mertabat serta membela kepentingan kaum ekonomi lemah. BMT adalah lembaga bisnis yang memperoleh keuntungan tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.¹

¹ Lindiawatie, Dhona Shahreza, Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No.1, Juni 2018, hlm.5.

Pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi sesuai sistem syariah.²

Koperasi syariah yang ada di Kabupaten Kolaka yang sifatnya internal atau terikat sudah banyak tetapi, untuk Koperasi yang bisa diakses untuk umum itu hanya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah.³ Istilah pembiayaan sebenarnya sudah identik dengan pinjaman berbasis syariah untuk membedakan dengan konvensional yang menggunakan istilah kredit. Kedua istilah tersebut memiliki filosofi makna yang berbeda. Pembiayaan berorientasi pada pinjaman untuk pembelian barang dan usaha sedangkan kredit adalah pinjaman uang. Penekanan pembiayaan adalah pada kebutuhan barang dan usaha sehingga berkembangnya uang karena hasil usaha atau jual beli barang (sektor riil). Berbeda dengan kredit yang menekankan pada uang sehingga bertambahnya uang karena uang itu sendiri.⁴

Ar-Rah}n adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rah}n* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵

Hukum gadai boleh, sebagaimana hukum jual beli karena setiap barang yang boleh dijual juga boleh digadaikan.⁶ Landasan syariah tentang *Rah}n* (gadai syariah) terdapat pada QS. Al- Baqarah (2) : 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

² Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance" *Jurnal Mahkamah*, Vol.2, No. 1, Desember 2016, hlm. 385.

³ Wawancara Dengan Muharjam, 14 Februari 2022.

⁴ M. Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah*, (Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009). hlm. 2

⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

⁶ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 510.

Terjemahnya: “*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁷

Berkaitan dengan ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Al- Misbah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai. Disini, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi, atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan, pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi, yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si pemberi/penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak.⁸

Dapat disimpulkan bahwa *Rah}n* adalah suatu kegiatan bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai, adapun salah satu syarat *Rah}n* yaitu adanya jaminan. Berupa kepercayaan dan amanah terhadap yang memberi kepada yang diberi, dan yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi. Kelak si pemberi tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau yang disepakati kedua pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad *Rah}n* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka**”.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 49.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 739-741.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik gejala atau isu tertentu.⁹

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.¹⁰ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari individu, nilai-nilai sosial sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Studi Kasus (*case Studies*) yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kantor KSPPS Mutiara Harapan Jamaah, bertempat di Jl. Pemuda No. 194 Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan adalah

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Penelitian pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap objek yang akan diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua.

b. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi data memiliki makna yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.¹¹ peneliti dalam mereduksi

⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 2.

¹⁰ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

¹¹ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 134.

data akan memfokuskan pada Koperasi syariah menggunakan pembiayaan akad Rahn (Gadai Syariah) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kab. Kolaka

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah merangkum dan mereduksi data peneliti melakukan penyajian data (*Data Display*). *Data Display* adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹²

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, sebab-akibat atau preposisi. Sedangkan kesimpulan menurut Sugiyono (2008) kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Bentuk Pembiayaan Pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah

KSPPS Mutiara Harapan Jamaah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan suatu terobosan produk guna guna menarik anggotanya. Koperasi ini juga terus menawarkan produk-produk menarik sebagai fasilitas untuk para anggotanya yang ingin melakukan funding maupun landing. Dalam penggalangan dana dari anggota maupun calon anggota, KSPPS Mutiara Harapan Jamaah memiliki produk-produk yang menarik dengan menggunakan Akad *Mud}a>rabah Musya>rakah*, Akad *Mura>bahah*, Akad *Wadi>ah*, dan Akad *Rah}n*. Transaksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah (KSPPS Mutiara Harapan Jamaah) harus jelas dan benar menurut syariah karena akad merupakan salah satu yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah.

a. Tabungan Wajib/Pokok (*Mud}a>rabah Musya>rakah*)

Pembiayaan modal usaha menggunakan akad *Mud}a>rabah Musya>rakah*. Jenis pembiayaan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan anggota. Pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* adalah kerjasama dua orang atau lebih, satu pihak bertindak

¹² Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 3, 2018, hlm. 94.

¹³ Sugiyono Wandu dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang" *Jurnal of physical Education, Sport, Health and Recreation*, Vol 2. Nomor 8, 2013, hlm. 528.

sebagai *S}ah}ibul Ma>l* (pemilik dana) dan satu pihak lain sebagai *Mud}a>rib* (pengelola dana). *S}ah}ibul ma>l* memberikan 100% modal dalam bentuk pembiayaan, sedangkan *Mud}a>rib* (pengelola dana) mempunyai kemampuan untuk mengelola dana tersebut guna menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang di peroleh *Mud}ar>ib* akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama.¹⁴

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar pihak Koperasi dengan Anggota. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil, yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan anggota yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mud}a>rabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*s}ah}ibul ma>l*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mud}a>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 2) *Musya>rakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

b. Tabungan Suka Rela (*Wadi>ah*)

Akad *Wadi>ah* adalah akad tabungan dengan konsep titipan, maksudnya Anggota (Nasabah) sebagai pihak yang menitipkan dananya kepada Koperasi (Bank). Pada tabungan ini pihak yang menitipkan seharusnya membayar biaya titipan atas dana yang dititipkannya. Tetapi karena dana yang dititipkan tersebut dikelola oleh pihak Koperasi (Bank) dan menghasilkan pendapatan maka itulah yang digunakan untuk menutup biaya titipannya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Istan, Idi Warsah, "Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup", Vol. 18 No.1, Agustus 2018, hlm. 130.

¹⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No.1, Februari 2015.

¹⁶ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Cet. I; Yogyakarta:UAD PRESS, 2018), hlm. 116.

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi>ah*, dalam hal ini KSPPS Mutiara Harapan Jamaah sebagai pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan serta menanggung kemungkinan terjadi kerugian. Karena dalam prinsip *wadi>ah* ini, pihak penerima titipan (Koperasi) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan Koperasi juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan setiap saat nasabah mengambil titipan tersebut atau berdasarkan kesepakatan.¹⁷

Adapun ayat tentang akad *Wadi>ah* terdapat dalam QS. *An-Nisa* (4): 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima*”.

c. Kredit (*Mura>bahah*)

Kegiatan pembiayaan *mura>bahah* adalah bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan usaha maupun pribadi anggota, sedang pembiayaan yang dapat diberikan atau yang digunakan yaitu sebagai modal kerja atau modal usaha untuk kepentingan anggota. Dengan adanya pembiayaan murabahah memberikan kemudahan untuk anggota KSPPS Mutiara Harapan Jamaah untuk mendapatkan tambahan modal. Dengan adanya pembiayaan *mura>bahah* dapat memudahkan anggota KSPPS Mutiara Harapan Jamaah untuk mendapatkan tambahan modal, sehingga antara anggota dengan pihak koperasi dapat saling menguntungkan.

Adapun ayat tentang *Mura>bahah* terdapat pada QS. *An-Nisa* (4): 29.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Terjemahan: “*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu*”.

Pembiayaan *mura>bahah* adalah salah satu pembiayaan yang transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Fatwa MUI murabahah merupakan pembiayaan yang

¹⁷ Aravira Nur Kholifah, “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”, 2020, Semarang hlm. 5-6.

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga uang lebih sebagai laba.¹⁸

d. Gadai Syariah (*Rahj}n*)

Peminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahj}n* dibolehkan dengan ketentuan *Murt}a>hin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marh}u>n* (barang) sampai semua hutang *Rahj}in* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Serta besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marh}u>n* tidak boleh ditentukan jumlah pinjaman.¹⁹

Barang jaminan merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan
- b. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah
- c. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
- d. Agunan harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain
- e. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat
- f. Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.²⁰

Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahj}n* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakan dalam Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *rahj}n*. Adapun dasar pertimbangan Fatwa tersebut bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dan untuk itu perlu direspon dalam berbagai produk LKS, agar kegiatan *rahj}n* tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

Firman Allah dalam QS. Al- Mudat}t}sir (74): 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya: “Tiap-tiap orang bertanggung jawab atas apa yang tela diperbuatnya”.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad Rahn No:25/DSN-MUI/III/2002.

²⁰ Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Cet I; Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 63-64.

²¹ Rachmadi Usman, *Produk dan AKad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet I: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 293.

2. Bentuk Akad *Rahj*n di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah

Gadai syariah atau *rahj*n adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan di era sekarang yang sudah banyak mengedepankan istilah pembiayaan sebagai alternatif cara untuk mendapatkan uang. Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan, baik dilakukan oleh lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank. KSPPS Mutiara Harapan Jamaah adalah salah satu hasil pemekaran produk dari Lembaga Keuangan Non-Bank yang berbasis syariah, sehingga lahirlah Koperasi yang berorientasi pada sistem dan cara syariah atau lazim dikenal dengan istilah Koperasi Syariah.²²

Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.²³

Pinjaman dengan bentuk menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahj*n dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtja>hin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhju>n* (barang) sampai semua utang *Rahj*n (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhju>n* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahj*n. Pada prinsipnya, *Marhju>n* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtja>hin* kecuali seizing *Rahj*n, dengan tidak mengurangi nilai *Marhju>n* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhju>n* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahj*n, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtja>hin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahj*n.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhju>n* tidak boleh ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhju>n*.
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtja>hin* harus memperingatkan *Rahj*n untuk segera melunasi utangnya.

²² Shintya Robiatul Adawiyah, dkk, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung", *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 160-161.

²³ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet I; Jakarta, Kencana, 2021), hlm. 167.

- 2) Apabila *Rahjin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *Marhu>n* dijual paksa/diezekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *Marhu>n* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahjin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahjin*.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan

1. Bentuk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka yaitu Tabungan wajib/pokok dengan menggunakan akad *Mudja>rabah Musya>rakah* dan Tabungan suka rela dengan menggunakan akad *Wadia>h* merupakan produk utama yang ada di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka. Ketika terdaftar jadi anggota Koperasi dengan melakukan pembiayaan *Mudja>rabah Musya>rakah* dan *Wadia>h* maka anggota bisa mengakses Pembiayaan berupa Kredit (*Murja>bahah*) dan Gadai Syariah (*Rahjn*) yang ada di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka.
2. Bentuk pembiayaan menggunakan akad *Rahjn* di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahjn*, yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpann *Marhu>n* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. R., et al. (2018). Pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung. *Pactum Law Journal*, 1(2), 160-161.
- Alim, M. N. (2009). *Pembiayaan Syariah* (Cet. I). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I). Sukabumi: CV Jejak.
- Antoni, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad Rahn No:25/DSN-MUI/III/2002.

- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exagrafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Akad Rahn No:25/DSN-MUI/III/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000.
- Hidayat, F. (2016). Alternative sistem pengawasan pada koperasi syariah simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam mewujudkan syariah compliance. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 385.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Kholifah, A. N. (2020). Implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Semarang, 5-6.
- Lindiawatie, D. S. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(1), 5.
- Muchtar, A. (2015). *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Cet I). Jakarta: Amzah.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Cet I). Jakarta: Kencana.
- Muhammad, I., & Warsah, I. (2018). Sistem pengembalian pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup. *Jurnal Mahkamah*, 18(1), 130.
- Nafik, M. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Cet. I). Yogyakarta: UAD PRESS.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cet. I). Jakarta: PT. Grasindo.
- Rijali, A. (2018). Analisi data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(3), 94.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek* (Cet. I). Yogyakarta: UAD PRESS.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah* (Cet. IV). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono, Wandu, et al. (2013). Pembinaan prestasi ekstrakurikuler olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*, 2(8), 528.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet I). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Cet I). Surakarta: Muhammadiyah University Press.